

POTENSI UMKM DORONG PENINGKATAN EKONOMI NASIONAL

Pekerja menyelesaikan proses pembuatan kue donat di industri rumahan pembuatan donat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (21/12). Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2021 sebanyak 64,1 juta dan tenaga kerja yang terserap mencapai 116 juta sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 62,36 persen.



Penerimaan Pajak Tembus Rp1.082,6 Triliun Sri Mulyani: Bukti Ekonomi Terus Membaik

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak hingga November 2021 ditopang oleh komponen PPN Dalam Negeri, PPh Badan, dan PPh 21. Porsinya masing-masing 25,29 persen, 15,60 persen, 15,21 persen dan 12,06 persen dari total penerimaan pajak.

JAKARTA (IM) - Pemerintah mencatat penerimaan pajak hingga November 2021 sudah mencapai Rp1.082,6 triliun atau setara dengan 88 persen dari target APBN yang senilai Rp1.229,6 triliun. Penerimaan pajak pada bulan November 2021 tumbuh sebesar 17 persen secara tahunan (year on year/yooy), melanjutkan pertumbuhan sebesar 15 persen pada bulan Oktober 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus membaik. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi karena adanya penyerapan tenaga kerja hingga kembali beroperasi industri.

"Ini karena aktivitas ekonomi yang nampaknya mengalami penguatan yang tinggi terutama sesudah kita bisa

melakukan penanganan Delta (varian Covid-19)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/12).

Ia mengatakan, penerimaan pajak hingga November 2021 ditopang oleh komponen PPN Dalam Negeri, PPh Impor, PPh Badan, dan PPh 21. Porsinya masing-masing 25,29 persen, 15,60 persen, 15,21 persen dan 12,06 persen dari total penerimaan pajak.

Keempat komponen itu mencerminkan pemulihan ekonomi. PPh 21 misalnya, meningkat menjadi 3,4 persen secara year to date/yttd dari minus 5,2 persen di periode yang sama tahun lalu. Hingga November 2021 ini, PPh 21 tumbuh 11 persen (yooy).

Kenaikan itu utamanya, menggambarkan adanya penciptaan kesempatan kerja, mengingat PPh 21 adalah pajak

yang dibayar oleh karyawan. "Jadi keempat komponen ini menggambarkan kegiatan ekonomi positif, juga sumbangkan penerimaan pajak yang positif," sebut Ani.

Sri Mulyani juga melaporkan, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terealisasi sebesar Rp533,6 triliun, atau 71,6 persen dari pagu Rp744,77 triliun hingga 17 Desember 2021. Artinya, masih ada dana sekitar Rp210 triliun yang belum dibelanjakan pemerintah padahal akhir 2021 tinggal menghitung hari.

"Kita melihat sampai 17 Desember 2021 terealisasi dari pencairan PEN mencapai Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu Rp744,77

triliun. Tinggal 2 minggu lagi dan masih ada Rp210 triliun yang belum terbelanjakan," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci, realisasi di kluster kesehatan mencapai Rp147,44 triliun, atau 68,6 persen dari alokasi senilai Rp215 triliun. Kluster kesehatan diprediksi akan menyerap anggaran sebesar Rp202,94 triliun atau 94,2 persen sampai akhir 2021.

Adapun kluster perlindungan sosial sudah mencapai Rp161,17 triliun, atau 86,4 persen dari alokasi sebesar Rp186,6 triliun. Diprediksi serapan anggaran perlindungan sosial akan mencapai Rp177,6 triliun, atau 95,2 persen dari alokasi tersedia.

Kemudian, kluster program prioritas terserap Rp87,47 triliun atau 74,2 persen dari pagu Rp117,9 triliun. Rinciannya, program padat karya K/L sebesar untuk 1,61 juta tenaga kerja, sertifikat CHSE serta akomodasi nakes dalam rangka meningkatkan industri perhotelan, ketahanan pangan, pemutakhiran DTKS, dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun.

Selanjutnya, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar Rp74,36 triliun, atau 45,8 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Dan kluster insentif usaha dengan realisasi 100,5 persen atau Rp63,16 triliun dari pagu Rp62,83 triliun. • **dro**

10 Investor Besar Asal RRT Siap Bangun Kawasan Industri Hijau Kaltara

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada 10 investor besar asal RRT siap membangun kawasan industri hijau di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).

"Ada 10 investor besar dari Tiongkok yang bersama kita hari ini, mereka adalah investor yang telah terbukti dan memiliki track record investor yang sangat baik," ujar Luhut dalam sambutannya saat groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12).

Para investor tersebut adalah investor yang juga menanamkan modalnya untuk investasi nikel di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Luhut mengaku sudah mengunjungi beberapa negara di Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab (UEA) sampai RRT untuk menawarkan peluang investasi di kawasan industri

hijau di Kaltara. Investor-investor tersebut nantinya akan membangun industri terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membangun soale panel, termasuk membangun PLTU yang akan di gunakan 10 sampai 15 tahun kedepan. "Saya kira industri yang kita kembangkan ini cukup diminati oleh negara-negara Eropa tahun-tahun ke depan," katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, pembangunan industri hijau di kawasan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit namun memiliki potensi sumber daya yang melimpah untuk diolah. Misalnya untuk pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) diperkirakan Luhut menelan biaya hingga USD10 miliar sampai USD12 miliar. Selain itu untuk pengembangan pelabuhan biayanya bisa mencapai USD1 miliar.

"Belum lagi untuk pelabuhan yang menjorok ke tengah laut karena kedalaman yang dangkal di sisi pantai yang juga mem-

butuhkan biaya yang tidak sedikit, paling tidak hampir USD1 miliar untuk pengembangan pelabuhan saja," kata Luhut.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Bulungan, Kalimantan Utara. Dia mengklaim itu akan menjadi yang terbesar di dunia.

Jokowi menjelaskan bahwa Kawasan Industri Hijau ini dibangun dalam rangka transformasi ekonomi Indonesia yang bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, dengan mengeksplor barang mentah. "Sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita," katanya yang disaksikan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (21/12).

Dengan kehadiran Kawasan Industri Hijau, Indonesia dapat mengeksplor barang setengah jadi hingga barang jadi sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi Indonesia. • **dot**

OJK Tingkatkan Literasi Keuangan di Indonesia

JAKARTA (IM) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Hal itu merupakan upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Edukasi dan literasi keuangan merupakan kemampuan dasar yang penting dan wajib dimiliki setiap individu agar lebih melek dan cerdas berkeuangan sehingga pada akhirnya dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional," kata Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12).

Tirta menjelaskan SNLKI 2021-2025 disusun berdasarkan tiga pilar, yaitu cakap keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak, dan akses keuangan.

"Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025 merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan penguatan SNLKI tahun 2013 dan Revisi 2017. SNLKI 2021-2025 akan menjadi pedoman yang bersifat nasional bagi OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program literasi dan edukasi keuangan sehingga upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur dan terkoordinasi." Kata Tirta.

Bersamaan dengan itu, OJK juga meluncurkan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan dan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin. Tirta berharap infrastru-

tur literasi keuangan tersebut dapat meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Pengembangan LMS menjadi bentuk bauran strategi pelaksanaan edukasi secara offline dan online. Tentunya dalam rangka mengatasi tantangan demografis dan geografis yang dihadapi Indonesia. Aliansi strategis yang telah dijalin OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan LMS mendukung pelaksanaan edukasi secara online.

Tujuan pengembangan LMS adalah mempermudah kegiatan belajar dan pelaksanaan pelatihan literasi keuangan; memperluas akses peserta terhadap sarana dan prasarana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan; mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan; dan memetakan tingkat pemahaman materi literasi keuangan.

LMS yang diakses melalui situs <https://lmsku.ojk.go.id> ini diharapkan mendukung implementasi program kerja perluasan akses keuangan di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal itu juga bertujuan untuk mengakselerasi pemerataan indeks literasi keuangan di daerah.

Upaya meningkatkan literasi keuangan bagi calon pengantin juga dilakukan OJK dengan meluncurkan buku saku literasi keuangan. Buku saku tersebut terdiri dari sembilan materi yaitu OJK dan waspada investasi ilegal, perbankan, pasar modal, perasuransian, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perencanaan keuangan, dan financial technology pendanaan bersama. • **dot**



DIGITALISASI PEMBAYARAN PARKIR

Warga memindai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui aplikasi DOKU e-Wallet saat bertransaksi pembayaran parkir di sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali, Selasa (21/12). DOKU berkolaborasi dengan BSS Parking melakukan proses digitalisasi transaksi di industri perparkiran sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, tercatat dan aman yang meminimalisir terjadinya kontak fisik guna mencegah penyebaran Covid-19.



SU 01019
TELEPON KELUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

Telepon Hemat Ke Luar Negeri!
suara Jernih ngobrol pun nyaman

Cuma Rp 6an-/detik*

Tekan Kode Akses 01019
TELKOMSEL dan XL

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

<https://www.facebook.com/GaharuTelecom> <https://www.twitter.com/GaharuTelecom>

* Khusus untuk negara China, USA, Canada, Hong Kong, Singapore: tarif Rp 6an-/detik dengan menggunakan GSM Telkomsel
* Tarif belum termasuk PPN & pembuatan per 6 detik

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI
Customer Service : 021-634 5009
Mobile : 0811 17 50 291-95
SMS : 0811 17 50 369
E-mail : support@gaharu.co.id

GAHARU
TELECOM

www.gaharu.co.id

BRI-Pegadaian Luncurkan Kartu Kredit Berbasis Tabungan Emas

JAKARTA (IM) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pegadaian melakukan sinergi. Salah satunya melalui sinergi produk terbaru Kartu Emas sebagai alat pembayaran berbasis saldo tabungan emas.

Peluncuran Kartu Emas Pegadaian yang digelar pada Senin lalu dihadiri Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, serta Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman.

Produk ini merupakan kartu kredit co-branding yang menjadi salah satu langkah nyata penguatan sinergi dan konsolidasi bisnis antara BRI dan Pegadaian, serta mendorong minat masyarakat terhadap aset emas.

Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto mengatakan, Kartu Emas Pegadaian memberikan pengalaman berbeda bagi nasabah. Pasalnya, saldo

pada Kartu Emas merupakan saldo tabungan emas, yang dikonversi dengan sistem gadaai tabungan emas.

Nasabah dapat memiliki Kartu Emas jika rekening Tabungan Emas yang didaftarkan mempunyai saldo minimal 5 gram yang terhubung di aplikasi Pegadaian Digital, dan sudah melakukan upgrade Akun Premium.

Syarat lainnya adalah nasabah berusia minimal 21 tahun atau 17 tahun jika sudah menikah. Nasabah juga dapat menambah sendiri limit kredit yang diinginkan sesuai dengan saldo emas yang dimiliki tanpa harus melalui screening.

Dijelaskan Kuswiyoto, proses pengajuan kartu kredit co-branding tersebut sangat mudah dan cepat. Melalui aplikasi Pegadaian Digital, nasabah tabungan emas dapat menempuh pengajuan kartu emas, mendapat informasi status aplikasi, pengiriman dan aktivasi kartu, informasi kartu dan transaksi. • **dot**

25 Perusahaan Masih Antre Masuk Bursa

JAKARTA (IM) - Direktur Penilaian BEI Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan, saat ini ada 25 perusahaan yang berada dalam pipeline Bursa, untuk melakukan initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana.

"Pada pipeline saham Bursa, hingga saat ini masih ada 25 perusahaan yang berencana untuk mencatatkan sahamnya di BEI," kata Nyoman, Selasa (21/12).

Nyoman menyebutkan, sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, sudah ada 54 perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan perolehan dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp62,61 triliun.

Adapun klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, yakni 11 perusahaan memiliki aset skala menengah, antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, dan 11 perusahaan lainnya dengan aset skala besar atau di atas Rp250 miliar. Sementara tiga perusa-

haan memiliki aset skala kecil, atau di bawah Rp50 miliar.

Adapun rincian sektornya yakni, enam perusahaan dari sektor consumer cyclicals, masing-masing empat perusahaan dari sektor industrials, dan consumer non-cyclicals. Kemudian, tiga perusahaan dari sektor properties & real estate.

Selanjutnya, masing-masing dua perusahaan dari sektor technology, energy, dan infrastructures. Terakhir, satu perusahaan masing-masing dari sektor basic materials, dan sektor financials.

Nyoman menambahkan, pada tahun 2022, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,7-5,5 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,2-4 persen.

Menurut dia, keberlanjutan perbaikan ekonomi domestik dan global serta indikator-indikator di pasar modal Indonesia yang relatif baik, menimbulkan antusiasme bagi para pelaku pasar modal. "Dengan kondisi yang demikian, kami optimis aktivitas pencatatan di tahun 2022 akan lebih baik dari tahun ini," kata Nyoman. • **pan**